



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS AIRLANGGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI MELANI HARIYADI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN III
3. NHK : 511752

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.882.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/217.2 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/43 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
3. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	391.800.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 324.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA B97 M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
4. MOTOR, HONDA Vario 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 19.600.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	497.845.013
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.785.545.013



III. HUTANG

Rp. 217.145.467

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.568.399.546

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.